

Analisa Pola Partnership Dalam Pengelolaan Obyek Wisata Umbul Tirto Marto

Pengging Kabupaten Boyolali Tahun 2012-2014

Oleh:

Aldila Merdiana Dewanti (14010110141043)

Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Diponegoro

Jl. Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kode Pos 1269

Website: <http://www.fisip.undip.ac.id/> email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

Partnership in the management of Tourism Umbul Tirto Marto Pengging is one of Boyolali Government's breakthrough in realization of good governance in the field of tourism. In the management of the tourist attractions, Boyolali Government's and private parties agree to use a pattern partnership contract concessions, which the private sector is only given the responsibility of providing the service management over part or all of a specific infrastructure, including system operation and maintenance facilities as well as providing a service to the community and the provision of working capital.

This partnership can be expressed successfully and can be references as well as recommendations for Governments to develop assets and Boyolali district in other area-based management systems with the use of partnerships. This is because the concept of partnership in Boyolali as minor policy because the policy remains the

Government's agenda, yet familiar. It is visible from some assets have been worked by using a system of partnership.

Keywords: *tourism, management, and partnership*

A. PENDAHULUAN

Kabupaten Boyolali merupakan salah satu kabupaten di Jawa tengah yang mempunyai posisi strategis karena diapit oleh dua kota besar yakni Kota Semarang dan Kota Surakarta. Kabupaten yang mempunyai luas wilayah 101.510,1 km² ini mempunyai potensi wisata yang sangat layak untuk dikembangkan. Kabupaten Boyolali adalah salah satu DTW (Daerah Tujuan Wisata) di Jawa Tengah terletak di lereng gunung Merapi dan Merbabu sehingga memiliki pemandangan alam yang eksotis¹.

Keunikan wisata air di Kabupaten Boyolali antara lain dikarenakan air yang terdapat disana berasal dari mata air asli yang mengalir secara terus menerus dan sangat jernih. Sumber air melimpah inilah yang kemudian dikelola menjadi tempat wisata air, kolam renang, kolamancing dan restoran yang menyediakan berbagai menu aneka ikan segar. Wisata tirta tersebut ialah Objek Wisata Tlatar dan Objek Wisata Pengging dimana kedua tempat wisata ini memiliki keunikan tersendiri antara lain memiliki restoran terapung dan terdapat banyak bangunan-bangunan bersejarah milik Kasunanan Surakarta².

¹ Pesona Wisata Kabupaten Boyolali, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Boyolali, diakses pada 14 Nopember 2013

² Kabupaten Boyolali, http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Boyolali, diakses pada 13 Nopember 2013

Didukung dengan letak Kabupaten Boyolali yang strategis dan keanekaragaman pariwisata yang dimiliki, hal ini seharusnya dapat meningkatkan potensi di bidang pariwisata, agar dapat menyokong PAD Kabupaten Boyolali, namun tidak hanya itu saja perkembangan di bidang pariwisata juga dapat memperluas lapangan pekerjaan, meningkatkan kesejahteraan rakyat, melestarikan alam dan berfungsi sebagai penguatan citra daerah. Tetapi kenyataannya disini pariwisata di Boyolali masih sangat tertinggal dan tidak terlalu menunjukkan perkembangan di setiap tahunnya. Tidak mengalami perkembangan justru malah mengalami kemerosotan di semua oobjek wisata yang ada, seperti fasilitas yang disediakan, infrastruktur, dan pelayanan bagi pengunjung yang datang.

Buruknya pengelolaan di pariwisata Boyolali dikarenakan pemerintah kabupaten Boyolali belum menggarap serius di sektor pariwisata dan tidak mempunyai program- program baru untuk meningkatkan pariwisatanya. Pemerintah kabupaten sebetulnya sudah mengadakan promosi tetapi promosi tersebut tidak membuahkan hasil jika tidak adanya program – program baru yang dibuat. Apabila sudah mempunyai program yang akan dilaksanakan seharusnya dapat dijalankan secara signifikan³. Selain itu fakta juga menunjukkan bahwa banyak program yang dibuat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan belum dilaksanakan dengan baik dan hanyalah menjadi rutinitas saja.

Untuk memperbaiki dan meningkatkan pariwisata di Kabupaten Boyolali, maka Pemerintah Kabupaten Boyolali mengadakan kerjasama dengan pihak swasta demi mengembangkan pariwisata yang sudah ada. Kerjasama ini sudah dilaksanakan antara Objek Wisata Umbul Pengging yang baerada di Desa Dukuh, Kecamatan Banyudono. Bersama CV. Win Win, Pemkab Boyolali melakukan kerjasama ini menggunakan sistem lelang, dimana semua investor atau pihak swasta diperbolehkan mengikuti proses lelang dan pemenangnya berhak mengelola obyek wisata yang

³ Pariwisata Boyolali Masih Amburadul, diunduh dalam <http://www.edisicetak.joglosemar.co/node/50328>, pada 13 Nopember 2013

ditawarkan. Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Boyolali dengan CV. WIN WIN baru saja disepakati pada tahun 2012 dengan menggunakan sistem setoran tiap tahun. Biaya yang dikeluarkan untuk disetorkan kepada pemerintah tiap tahun adalah sekitar Rp 272 juta dan tiap tahun mengalami kenaikan setoran. Pada awal perjanjian kesepakatan naik 10%, tetapi dikarenakan pihak swasta merasa keberatan maka setelah diadakan negosiasi dengan pihak pemerintah maka kenaikan mulai tahun 2013 hanya sebesar 3%⁴.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pola partnership yang digunakan Pemerintah Kabupaten Boyolali dalam mengelola obyek wisata Umbul Pengging di Kabupaten Boyolali. Serta berguna untuk mengembangkan ilmu tentang manajemen pelayanan kepariwisataan dan dapat ditujukan kepada pemerintah Kabupaten Boyolali agar memperbaiki dan mengembangkan pelayanan kepariwisataan yang ada.

Teori yang peneliti gunakan dalam menganalisis data adalah teori manajemen pelayanan publik, teori kemitraan, teori kepariwisataan. Manajemen pelayanan publik adalah segala aktivitas dari individu- individu pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang dimulai dari *planning, organissing, actuating dan controlling* dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar setiap warga negara dan penduduk atas suatu barang dan jasa publik atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan yang terkait dengan kepentingan publik

Kerjasama pemerintah dengan swasta merupakan transformasi dari otonomi daerah dimana pemerintah daerah mempunyai aktivitas yang lebih luas dalam membangun daerahnya. Dalam penyelenggaraan KPS, pemerintah daerah berperan sebagai wirausaha dan dituntut jeli dan proaktif agar kerjasama atau kemitraan yang dilakukan bersifat saling menguntungkan.

⁴ Kesepakatan Kontrak Sewa Obyek Pengelolaan Umbul Tirtomarto Obyek Wisata Pengging Desa Dukuh Kecamatan Bsnudono Kabupaten Boyolali, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Boyolali tahun 2012.

Sebuah negara khususnya negara berkembang harus merancang kebijakan pariwisata karena industri pariwisata sering dianggap sebagai jawaban dalam menghadapi berbagai kesalahan. Hal ini dikarenakan negara berkembang biasanya dikarakteristikan sebagai negara dengan tingkat pendapatan yang rendah, tingkat kesejahteraan tidak merata. Keadaan seperti ini biasanya mendapatkan keuntungan yang sangat besar dari kegiatan pariwisata dikarenakan banyak daerah yang tidak berkembang cenderung memiliki potensi wisata alam dan budaya.

Dalam melakukan penelitian, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Yaitu suatu proses penelitian ilmiah untuk memahami masalah-masalah manusia dalam konteks sosial dengan menciptakan gambaran menyeluruh dan kompleks yang disajikan, melaporkan pandangan terperinci dari para sumber informasi, serta dilakukan dalam setting yang alamiah tanpa adanya intervensi dari peneliti⁵. Peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu peneliti memilih subjek penelitian dengan tujuan untuk mempelajari atau memahami permasalahan pokok yang akan diteliti dan disesuaikan dengan tujuan penelitian⁶. Peneliti menetapkan lima informan kunci dalam penelitiannya, yaitu Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Boyolali, Direktur CV Win Win, dan Kepala UPTD obyek wisata Umbul Pengging.

B. PEMBAHASAN

B.1 Sistem Pengelolaan Umbul Tirto Marto Pengging Berbasis Kemitraan

Banyaknya potensi yang dimiliki Kabupaten Boyolali justru tidak diimbangi dengan maksimalnya pengelolaan Pemerintah Kabupaten Boyolali terhadap semua obyek wisata yang ada. Permasalahan seperti masih banyaknya tempat wisata yang terbengkalai, perawatan terhadap obyek wisata yang telah ada, serta konsistensi terhadap malasnya pengembangan obyek wisata. Keterbatasan pemerintah dalam

⁵ Haris Herdiansyah. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Salemba Humanika, hlm. 8

⁶ *Ibid*, hlm. 106

mengelola obyek-obyek wisata di Kabupaten Boyolali merupakan salah satu akar dari permasalahan tersebut. Tidak adanya biaya atau anggaran yang cukup oleh Pemerintah kabupaten Boyolali dalam mengembangkan pariwisatanya merupakan salah satu penyebab *mandeknya* upaya Pemkab Boyolali mewujudkan pariwisata yang mendunia. Selain itu terbatasnya Sumber Daya Manusia yang belum dapat mewujudkan pengelolaan yang aktif dan berkembang di Kabupaten Boyolali semakin menambah kemunduran manajemen kepariwisataannya.

Hal diatas tercermin pada tidak berkembangnya minat masyarakat atau wisatawan untuk berkunjung ke Obyek Wisata Umbul Tirto Marto Pengging di kabupaten Boyolali ini. Dalam beberapa tahun terakhir jumlah pengunjung obyek wisata ini mengalami fluktuasi dengan selisih dan perbandingan yang tidak signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa Obyek Wisata Umbul Pengging mengalami kondisi yang stagnan dari tahun ketahun. Ada pun rincian jumlah pengunjung Obyek Wisata Umbul Pengging dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 1
Jumlah Pengunjung Obyek Wisata Umbul Pengging

Tahun	Jumlah Pengunjung
2012	49.317
2011	55.313
2010	48.583
2009	44.781
2008	56.541
2007	43.583

Sumber: Statistik Daerah Kabupaten Boyolali, Tahun 2013

Dari berbagai permasalahan tersebut, kerjasama pemerintah dengan swasta dalam pengelolaan pariwisata di kabupaten Boyolali merupakan salah satu upaya atau jalan keluar dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Kerjasama ini dianggap sebagai langkah alternatif mengingat keterbatasan Pemerintah Kabupaten Boyolali dalam mengelola secara mandiri.

Dalam pelaksanaan kebijakan kerjasamanya, Pemerintah Kabupaten Boyolali bekerjasama dengan CV. Win Win sebagai pihak ketiga yang disepakati sejak 1 Januari 2012. Sebagai pihak ketiga dalam kerjasama ini, CV. Win Win memiliki kewajiban menyetor hasil pengelolaan sebesar Rp 272.727.272 kepada Pemerintah kabupaten Boyolali setiap tahunnya.

Kerjasama Pemerintah Kabupaten Boyolali dengan CV. Win Win dalam pengelolaan Obyek Wisata Umbul Tirto Marto Pengging diatur berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Sewa Nomor : 974/1886/17/2011. Perjanjian kontrak ini dibuat pada tanggal 31 Desember 2011, dan dalam surat perjanjian kontrak tersebut dijelaskan bahwa kerjasama antara pihak kesatu yaitu Disbudpar kabupaten Boyolali dengan pihak kedua yaitu CV. Win Win disepakati mulai tanggal 1 Januari 2012 dan berakhir pada 31 Desember 2014.

Pada tahun 2013 besarnya kontrak sewa yang harus dibayar CV. Win Win kepada Pemerintah Kabupaten Boyolali adalah sebesar Rp 280.909.090. dari total setoran tersebut adapun rinciannya adalah setoran dari kontrak tahun pertama sebesar Rp 272.727.272 ditambah 3% dari Rp 272.727.272 sebesar Rp 8.181.818. Dan besar sewa kontrak pada tahun selanjutnya adalah sebesar Rp 280.909.090 yang harus dibayarkan kepada Pemerintah setiap tahunnya.

Mengenai tarif masuk Obyek Wisata Umbul Tirto Marto Pengging sudah ditentukan dari pihak swasta yang diatur dalam surat perjanjian kontrak sewa tentang Pengelolaan Umbul Tirto Marto Pengging Desa Dukuh Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali pada perda nomor 12 tahun 2013 pasal 7 yang telah disepakati dengan pihak kesatu. Adapun tarif masuk Umbul Tirto Marto Pengging sebagai berikut :

1. Hari Biasa : Rp 2.000
2. Padusan/Syawalan : Rp 3.000
3. Natal dan Tahun Baru : Rp 3.000

Selain tarif masuk untuk hari biasa dan hari besar, adapula tarif untuk masuk ke dalam area kolam renang, apabila akan masuk ke dalam Umbul Temanten, Umbul Dudo, Umbul Ngabean pengunjung harus membayar tarif masuk lagi, yaitu sebesar :

1. Masuk Umbul Temanten : Rp 1.000
2. Masuk Umbul Dudo : Rp 1.000
3. Masuk Umbul Ngabean : Rp 2.000

Dari besaran tarif itu pula dapat diambil kesimpulan bahwa, keuntungan bukanlah merupakan tujuan awal dari kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Boyolali dengan pihak swasta. Kemitraan semata-mata dilakukan karena Pemerintah kabupaten Boyolali sangat ingin mengoptimalkan potensi yang ada dalam Obyek Wisata Umbul Tirto Marto Pengging dengan perbaikan manajemen yang lebih baik.

Dalam pelaksanaan kebijakan kemitraan di Obyek Wisata Umbul Tirto Marto Pengging ini, penentuan pihak swasta dilakukan melalui mekanisme sistem lelang yang diikuti oleh dua perusahaan, yaitu CV Paku Bumi dan CV Win Win. Semua perusahaan yang ikut dalam sistem lelang ini memiliki kewajiban dimana masing-masing perusahaan diharuskan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam tahap pemilihan pihak kedua, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata beserta Bupati Kabupaten Boyolali turut andil dalam menentukan keputusan. Setelah melalui proses lelang pengelola Obyek Wisata Umbul Tirto Marto Pengging, terpilihlah CV. Win Win sebagai pengelola atau rekanan Pemerintah kabupaten Boyolali dalam mengelola Obyek Wisata Umbul Tirto Marto Pengging.

Adapun faktor lain terpilihnya CV. Win Win menjadi pengelola Obyek Wisata Umbul Tirto Marto Pengging adalah dikarenakan CV. Win Win sebelumnya sudah sangat lama menempati Obyek Wisata tersebut. Namun dalam kurun waktu yang sangat lama tersebut, CV. Win Win hanya bertanggung jawab kepada sektor kuliner. Sehingga hal inilah yang menjadikan pertimbangan Pemerintah Kabupaten Boyolali untuk kembali menyerahkan tanggungjawab pengelolaan Obyek Wisata

Umbul Tirto Marto Pengging sepenuhnya kepada CV. Win Win. Karena merekalah yang sudah memahami dan mengerti situasi dan kondisi Obyek Wisata tersebut ketimbang pihak lain.

Hal diatas menunjukkan bahwa sebenarnya mekanisme lelang dalam penentuan pihak swasta pengelola Umbul Tirto Marto Pengging adalah mekanisme yang bersifat formalitas. Justru dalam pelaksanaannya yang ditemukan dalam penentuan pihak swasta pengelola obyek wisata tersebut adalah mekanisme penunjukkan yang sebelumnya telah ditentukan oleh para elit Pemkab Boyolali sebagai pemangku kebijakan.

B.2 Kesulitan Dalam Pengelolaan Umbul Tirto Marto Pengging

1. Pihak Swasta

CV Win Win selaku pihak swasta pengelola Obyek Wisata Umbul Tirto Marto Pengging, selama ini menghadapi kesulitan berupa keterbatasan yang ditekankan oleh Pemerintah Kabupaten Boyolali serta dari pihak Keraton Surakarta. Kesulitan tersebut terletak dalam hal fasilitas, dimana pihak swasta tidak boleh menambah dan mengurangi bangunan fisik yang ada di Obyek tersebut.

Dalam klausul perjanjian kontrak kerjasama pun dijelaskan bahwa Pihak Kedua dilarang menambah atau pun mengubah fasilitas dari obyek wisata yang sudah ada. Jikalau demikian memang dikehendaki untuk dilakukan penambahan atau perubahan, maka diperlukan ijin dari pihak Pemkab Boyolali dan pihak Keraton Surakarta. Hal ini dikarenakan menurut pihak keraton bangunan yang ada di Umbul Pengging harus dipertahankan nilai eksotikanya, karena tempat ini milik pihak keraton.

Hal diatas tentu saja menghambat kinerja CV. Win Win sebagai pengelola Obyek Wisata Umbul Pengging dimana perlu peningkatan dalam manajemen pelayanannya. Padahal target pendapatan dari pemerintah setiap tahun pasti

meningkat, sehingga hal ini tentu saja menghambat kinerja pihak swasta. Terlebih dalam perkembangan dunia yang semakin modern, diperlukan inovasi-inovasi dalam hal pelayanan maupun fasilitas dalam obyek wisata sebagai sarana publik yang tentu saja bertujuan untuk menarik minat masyarakat berkunjung. Karena dengan semakin tingginya minat masyarakat untuk datang ke obyek wisata ini, akan linier dengan jumlah pendapatan yang diperoleh. Namun pada realitanya, keterbatasan pihak swasta dalam mengembangkan dan meningkatkan manajemen pelayanannya membuat pihak swasta terbatasnya ruang gerak, sehingga pengelolaan akan dilaksanakan sesuai dengan standarnya saja.

Padahal Partnership atau kerjasama diasumsikan lebih bisa bekerja positif dalam mengelola pelayanan. Dengan uang yang dihasilkan, *partnership* dianggap cocok bagi pemerintah karena orientasi keberhasilannya ditentukan oleh besarnya kontribusi yang diberikan. Ini sesuai dengan permintaan pemerintah yang berusaha memperbaiki pelayanan dan dapat menghasilkan uang. Dengan adanya *partnership* secara otomatis akan terdapat manajer yang kreatif sebagai inisiator pengelolaan pelayanan. Manajer yang kreatif akan lebih efektif dalam mencari sumber daya baru guna membiayai pelayanan walaupun semua sumber daya telah tersedia⁷.

Lalu bagaimana jika pihak swasta dibatasi dalam berkreasi mengelola aset yang telah dilimpahkan kepadanya. Ini jelas tidak seiring dengan konsep *partnership* seperti diatas. Adanya pembatasan ruang gerak swasta untuk menciptakan sesuatu yang baru tidak relevan dengan target pendapatan yang sangat besar dan telah ditentukan pemerintah.

Tetapi meskipun pihak swasta tidak dapat menambah dan mengurangi fisik bangunan maupun fasilitas yang ada, pihak swasta tetap berupaya untuk semaksimal mungkin mengelola Obyek tersebut dengan merawat bangunan yang telah ada dan

⁷ Pratikno, dkk. 2004. Mengelola Dinamika Politik dan Sumberdaya Daerah. Yogyakarta. Program S2 Politik Lokal dan Otonomi Daerah UGM & DEPDAGRI. Hlm 97

lebih memelihara lingkungan sekitar Obyek dengan meningkatkan kebersihan dan kenyamaannya. Selama dikelola oleh pihak swasta, penambahan fasilitas yang dilakukan adalah penambahan kamar mandi dan ruang ganti untuk para pengunjung, penambahan ruang ganti sangat diprioritaskan, karena dahulu sebelum dikerjasamakan para pengunjung selalu mengeluhkan bahwa fasilitas ruang ganti masih sangat kurang dan kotor, apalagi ketika ada event-event tertentu seperti padusan (membersihkan diri) yang diselenggarakan menyambut bulan suci ramadhan dan masyarakat sangat berantusias untuk datang ke Umbul Pengging dan pengunjung sangat mebludak.

2. Pemerintah Kabupaten Boyolali

Dalam hal pengelolaan Obyek Wisata Umbul Tirto Marto Pengging, kesulitan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Boyolali terletak kepada sektor finansial. Adapun beberapa kesulitannya meliputi tingginya target PAD yang harus disetor kepada Pemerintah Kabupaten Boyolali. Padahal dalam pelaksanaan pengelolaan obyek wisata tersebut membutuhkan biaya operasional yang sangat tinggi. Biaya operasional ini digunakan untuk perawatan obyek wisata yang ada, pembayaran gaji pegawai sebagai penjaga obyek wisata, dll. APBD Kabupaten Boyolali lah yang selama ini mengcover segala kebutuhan yang ada dalam operasional Obyek Wisata Umbul Tirto Marto Pengging tersebut. Jika ini dibiarkan semakin lama, maka defisit pendapatan akan dialami oleh Kabupaten Boyolali yang efeknya akan sangat berbahaya bagi perekonomian mereka kelak. Padahal pendapatan dari obyek wisata ini sangat rendah dibandingkan dengan target PAD yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Boyolali.

Selain itu tingginya biaya marketing yang harus dikeluarkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Boyolali guna memasarkan dan mempromosikan obyek wisata unggulan di Kabupaten Boyolali ini. Adapun rinciannya digunakan sebagai iklan, promosi dan kebutuhan-kebutuhan lain untuk

menarik minat wisatawan berkunjung ke Umbul Pengging. Kegiatan promosi ini dilakukan melalui kegiatan-kegiatan lokal Kabupaten Boyolali berupa pagelaran budaya, penyelenggaraan Duta Wisata Kabupaten Boyolali, dll. Padahal penyelenggaraan kegiatan seperti tersebut juga tidak menghabiskan biaya yang sedikit, sehingga sangat tidak berimbang jika dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh setiap tahunnya.

Namun pada kenyataannya, obyek wisata yang berada di Boyolali sangat kurang diperhatikan oleh Pemerintah Kabupaten Boyolali sendiri, banyak obyek wisata yang sepi pengunjung bahkan mangkrak. Hal ini dapat terjadi karena pemasukan dan pengeluaran yang dihasilkan dari tempat wisata tidak seimbang sehingga pengelolaan pun tidak maksimal. Belajar dari berbagai masalah yang dihadapi, lalu Pemerintah Kabupaten Boyolali membuka peluang untuk pihak swasta ikut berpartisipasi dalam kerjasama obyek wisata yang ada. Saat ini beberapa obyek wisata di Boyolali sudah ada yang dikerjasamakan salah satunya yaitu Umbul Tirta Marto Pengging.

Setelah terjalannya kerjasama ini sangat memberikan dampak positif untuk kepariwisataan Boyolali, banyak obyek wisata yang sudah terawat dari segi pengelolaan dan fasilitas sehingga dapat menarik para pengunjung untuk datang mengunjungi obyek-obyek wisata yang ada di Boyolali. Masyarakat sangat berharap pariwisata yang ada di Boyolali dapat lebih berkembang, potensi yang tersimpan dapat lebih tergali. Apabila jalan kemitraan yang harus diambil demi kemajuan pariwisata maka tidak masalah apabila obyek wisata yang ada dikerjasamakan dengan pihak swasta, namun pengelolaannya tetap harus diawasi oleh Pemerintah Kabupaten Boyolali.

B.3 Kemitraan Dalam Pengelolaan Umbul Tirto Marto Pengging Memberikan Dampak Positif

Pemerintah Kabupaten Boyolali jelas merasakan dampak positif berupa hasil pendapatan yang diperoleh dari pemasukan Obyek Wisata Umbul Tirto Marto Pengging. Dari pendapatan tersebut dapat menyokong tujuan utama Pemerintah Kabupaten Boyolali dalam kemitraan ini, yaitu mewujudkan target Pendapatan Asli Daerah Obyek Wisata Umbul Pengging. Hal ini dikarenakan keberhasilan kemitraan salah satunya dan yang paling mudah ditentukan dari seberapa besar pendapatan yang disumbang dari terlaksananya kemitraan ini. Selain itu dengan kemitraan ini jelas dapat meringankan kinerja pemerintah sebagai penanggungjawab utama dalam mengembangkan salah satu pelayanan publik ini. Pemerintah dapat menghemat secara keseluruhan sumber daya yang ada, dengan memaksimalkan pelayanan yang dimiliki pihak swasta. Dengan demikian maka dapat mewujudkan efisiensi anggaran oleh Pemkab Boyolali dalam mengelola obyek wisata ini.

Sementara untuk masyarakat, dampak positif dari kemitraan antara Pemkab Boyolali dengan pihak swasta dapat dirasakan melalui hasil nyata Obyek Wisata Umbul Tirto Marto Pengging. Dengan prinsip kepuasan pelanggan, CV. Win Win selaku pihak swasta nyatanya dapat merepresentasikan dalam wujud Obyek Umbul Pengging saat ini. Dapat dilihat bahwa Obyek Wisata Umbul Pengging saat ini memang terlihat rapi dan terkesan tertata setelah adanya kemitraan tersebut. hal ini dikarenakan bahwa prinsip-prinsip tersebut memang harus dijunjung tinggi oleh CV Win Win selaku pihak swasta sebagai penanggungjawab Umbul Pengging saat ini. Hal ini juga berlaku pada pengembangan fasilitas-fasilitas di Obyek Wisata Umbul Tirto Marto Pengging. Kebersihan dan kerapihan aset-aset seperti kolam, arena theater, kios, tempat parkir maupun restoran akan selalu terjamin dikarenakan semua itu juga menjadi satu dari sekian standar penilaian pemerintah maupun masyarakat terhadap keberhasilan kemitraan tersebut.

Selain itu, masyarakat sekitar lebih merasakan dampak positif dari aspek ekonomi. Hal ini dikarenakan masyarakat sekitar Umbul Pengging sengaja diberdayakan oleh Pemerintah Kabupaten Boyolali maupun pihak swasta dari adanya kemitraan ini. Mereka sengaja megikutsertakan masyarakat sebagai penggerak ekonomi di Obyek Wisata Umbul Pengging ini dengan membuka kios-kios penjaja makanan maupun souvenir khas sekitar. Selain menambah retribusi wisata, hal tersebut juga otomatis menambah juga penghasilan masyarakat dimana semakin meningkatkan kesejahteraan masyarakat Boyolali pada umumnya.

C. PENUTUP

C.1 Simpulan

Kemitraan pada dasarnya menawarkan konsep keuntungan bagi pihak-pihak yang menjalankannya. Sesuai dengan prinsip kemitraan, bahwa dalam menjalankan sebuah kerjasama terlebih dalam pengelolaan sebuah aset, prinsip saling menguntungkan tetaplah menjadi modal utama selain kepercayaan (trust). Di Kabupaten Boyolali sendiri, konsep kemitraan ini seperti tergolong kebijakan minor dikarenakan kebijakan kemitraan ini masih menjadi agenda pemerintah yang belum familiar. Hal ini terlihat dari beberapa aset daerah saja yang telah berjalan dengan menggunakan sistem kemitraan.

Dari hasil kajian diatas, maka kemitraan dalam pengelolaan Obyek Wisata Umbul Pengging lebih jelas diuraikan dalam poin-poin dibawah ini:

1. Kemitraan dalam pengelolaan Obyek Wisata Umbul Pengging dapat dinyatakan berhasil. Hal ini dapat menjadi refrensi dan rekomendasi bagi Pemerintah Kabupaten Boyolali untuk mengembangkan aset daerah lainnya dengan menggunakan sistem pengelolaan berbasis kemitraan.
2. Bentuk kemitraan yang digunakan dalam pengelolaan Obyek Wisata Umbul Tirto Marto Pengging adalah Kontrak Konsesi (*Concession*

Contract), dimana swasta hanya diberi tanggung jawab menyediakan jasa pengelolaan atas sebagian atau seluruh sistem infrastruktur tertentu, termasuk pengoperasian dan pemeliharaan fasilitas serta pemberian layanan kepada masyarakat dan penyediaan modal kerjanya.

C.2 Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh, maka diperlukan saran dan rekomendasi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan pariwisata Kabupaten Boyolali, dan rekomendasi tersebut berupa:

1. Potret pariwisata Kabupaten Boyolali yang kurang berkembang menuntut pemerintah segera menemukan formula untuk mengatasinya. Paket wisata merupakan salah satu alternatif yang paling cocok dipilih karena konsep ini menawarkan program wisata yang berkelanjutan dan menyeimbangkannya dengan program promosi terhadap obyek wisata lainnya.
2. Untuk mewujudkan prinsip kemitraan yang sebenarnya, pemerintah tidak semestinya memberikan klausul kontrak yang membatasi kinerja swasta dalam upaya pengembangan suatu aset yang dikelola. Dalam kasus Obyek Wisata Umbul Pengging, CV Win Win memiliki keterbatasan dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan terkait inovasi, sementara pemerintah memberikan standar pendapatan yang harus diserahkan ke Pemkab Boyolali, ditambah dengan kenaikan setoran setiap tahunnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asrul. 2010. *Kerjasama antar daerah guna memajukan potensi wilayah*.
- Budiyono, Haris. 2010. *Penyusunan Model Kerjasama Ciayumajakuning*. Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
- Dr. Ir. Antonius Tarigan, M.Si. 2009. *Kerjasama Antar Daerah (KAD) untuk Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Daya Saing Wilayah*. Kasubdit Kelembagaan Pemerintah Daerah, Direktorat Otonomi Daerah Bappenas.
- Dwiyanto, Agus. 2010. *Manajemen Pelayanan Publik: peduli, inklusif dan kolaboratif*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Dwiyanto, Agus (ed). 2005. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Herdiansyah, Haris. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Manullang, M. 1997. *Dasar Dasar Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Pamudji. 1985. *Kerjasama Antar Daerah*.
- Pratikno, dan kawan-kawan. 2004. *Mengelola Dinamika Politik dan Sumberdaya Daerah*. Yogyakarta. Program S2 Politik Lokal dan Otonomi Daerah UGM & DEPDIAGRI.
- Riadi, Muchlisin. 2013. *Pelayanan Publik*. Kajian Pustaka.
- Sari, Ir. Suzanna Ratih, MM.,MA. 2004. *Peran Pariwisata Dalam Pembangunan*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang.

Sutopo. 2001. *Administrasi dan Manajemen Organisasi*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara RI.

Zaini, Helmy Faishal. 2011. *Kerjasama Daerah dan Pemberdayaan Daerah Tertinggal*. Kementerian pembangunan daerah tertinggal republik indonesia.

Jurnal

Martini, Emma Sri. 2011. Kemitraan Pemerintah Swasta di Sektor Infrastruktur.
Media Keuangan: 8-10

Beaumont Narelle and Dredge Dianne. 2010. *Local Tourism Government, a Comparison of Three Network Approaches*. Research and Scholarly Publication of Southern Cross University. Vol 18

Laporan/ kertas kerja

Pesona Wisata Kabupaten Boyolali, Dokumen Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Boyolali, Tahun 2013.

Kesepakatan Kontrak Sewa Obyek Pengelolaan Umbul Tirtomarto Obyek Wisata Pengging Desa Dukuh Kecamatan Bsnudono Kabupaten Boyolali, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Boyolali, Tahun 2011.

Dokumen Surat Perjanjian Kontrak Sewa Obyek Wisata Pengging, Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali, Tahun 2011

Internet

Pariwisata Boyolali Informasi Kepariwisataaan Kabupaten Boyolali. 2013. Dalam <http://www.pariwisataboyolali.com/>, diunduh pada 13 Nopember 2013, pukul 19.23 WIB.

Kabupaten Boyolali. 2013. Dalam http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Boyolali, diunduh pada 13 Nopember 2013, pukul 20.13 WIB.

Pariwisata Boyolali Masih Amburadul. 2013. Dalam <http://www.edisicetak.joglosemar.co/node/50328>, diunduh pada 13 Nopember 2013, pukul 20.22 WIB.

Potensi dan pengembangan objek wisata umbul sewu pengging sebagai objek wisata unggulan di Kabupaten Boyolali. 2013. Dalam <http://eprints.uns.ac.id/8835/1/156572308201001181.pdf>, diunduh pada 13 Nopember 2013, pukul 19.47 WIB.